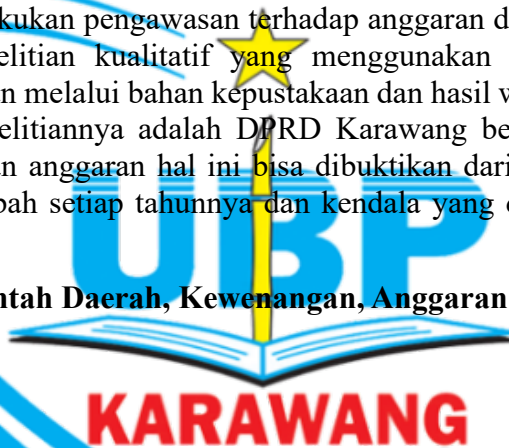


ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijadikan sebagai salah satu sumber formil di Indonesia. Sehingga setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang adalah masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD Karawang sehingga penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah dan apa saja kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Karawang dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu dengan melalui bahan kepustakaan dan hasil wawancara langsung dilapangan. Hasil penelitiannya adalah DPRD Karawang belum optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran hal ini bisa dibuktikan dari temuan BPK yang terus menurun bertambah setiap tahunnya dan kendala yang dialami oleh DPRD seperti kendala teknis.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kewenangan, Anggaran



ABSTRACT

Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is used as one of the formal sources in Indonesia. So that every government activity carried out must be in accordance with these regulations. The phenomenon that occurs in Karawang Regency is that there is still a lack of supervision carried out by the Karawang DPRD so this research wants to discuss the role and function of DPRD supervision in supervising the regional budget and what obstacles are experienced in carrying out this supervision. The purpose of this study is to find out what kind of supervision is carried out by the DPRD of Karawang Regency in supervising the regional budget. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely by going through library materials and the results of direct interviews in the field. The results of his research are that the Karawang DPRD has not been optimal in overseeing the use of the budget, this can be proven from the findings of the BPK which continues to increase every year and the obstacles experienced by the DPRD, namely technical constraints.

Keywords: Local Government, Authority, Budget

